

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**
(Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu)

SKRIPSI



NAMA : Heru Nurmansyah
NIM : 222015094

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**
(Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**NAMA : Heru Nurmansyah
NIM : 222015094**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heru Nurmansyah

NIM : 22 2015 094

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya akan sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, 6 Februari 2019

Penulis



Heru Nurmansyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

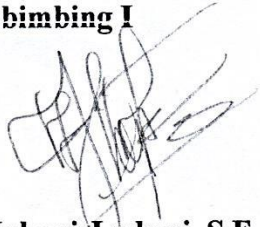
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi
Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu)

Nama : Heru Nurmansyah
NIM : 222015094
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal.....2019

Pembimbing I



DR. Hj. Yuhani Ladewi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0226016901/765380

Pembimbing II



Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

**Mengetahui,
Dekan**

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ Kubiarkan orang lain menghinaku, kelak akan kubalas dengan membuktikan kesuksesanku.

(Heru Nurmansyah)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Mama dan Bapakku tersayang
- ❖ Adikku terkasih
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamaterku.

PRAKATA

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Sholawat seiring salam tak lupa tercurahkan selalu kepada suritauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman kelak.

Penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orangtua Bapak (Nana Jumhana) dan Ibu (Ernayanti) yang telah mendidik, memberikan dukungan dan doa, memberikan kecukupan dalam hal materi maupun moril. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu DR. Hj. Yuhanis Ladewi, S.E., M.Si.,Ak.,CA dan Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran dan masukkan dengan baik, sabar dan ikhlas, serta selalu memberi motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak DR. H. Abid Djazuli, S.E., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pimpinan beserta para pegawai Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bengkulu yang bersedia menjadi responden dan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner.
6. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 04 Februari 2019

Penulis



Heru Nurmansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS	
A. LandasanTeori	11
1. Sistem Pengendalian Intern	11
2. Penerapan SAP Berbasis Akrua.....	17
3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	23

B. Kerangka Pemikiran.....	32
1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.....	32
2. Pengaruh SAP Berbasis AkruaI dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	34
C. Hipotesis.....	40
1. Secara Bersama.....	40
2. Secara Parsial.....	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Operasionalisasi Variabel.....	42
D. Populasi Penelitian.....	44
E. Data yang Diperlukan	46
F. Metode Pengumpulan Data	46
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	48
1. Analisis Data.....	48
2. Teknik Analisis.....	49
a. Uji Validitas	50
b. Uji Reliabilitas.....	50
c. Uji AsumsiKlasik	51
d. Regresi Linier Berganda	54
e. Uji Hipotesis.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	58
1. Profil Responden.....	58
2. Tingkat Pengembalian Kuesioner	59
3. Pengujian Data	61
a. Uji Validitas	61

b. Uji Reliabilitas.....	65
4. Analisis Statistik Deskriptif.....	76
5. Uji Asumsi Klasik	83
a. Uji Normalitas	83
b. Uji Multikolinearitas.....	84
c. Uji Heteroskedastisitas	85
d. Uji Autokorelasi	96
e. Uji Regresi Linear Berganda.....	87
f. Pengujian Hipotesis	88
1. Uji Hipotesis Secara Simultan/Bersama (Uji F) ...	88
2. Uji Hipotesis Secara Parsial/Individu (Uji t)	90
B. Hasil Pembahasan.....	92
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	96
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Hasil Opini BPK atas LKPD Kota Bengkulu Tahun 2013-2017	7
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	37
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	42
Tabel III.2 Populasi dan Sampel	44
Tabel IV.1 Profil Responden.....	58
Tabel IV.2 Pembagian Kuesioner.....	60
Tabel IV.3 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern (X1)	62
Tabel IV.4 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan SAP berbasis Akrual (X2).....	63
Tabel IV.5 Hasil Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y).....	65
Tabel IV.6 Hasil Hasil Uji Reliabilitas	66
Tabel IV.7 Analisis Statistik Deskriptif Frekuensi Variabel Sistem Pengendalian Intern (X1)	67
Tabel IV.8 Analisis Statistik Deskriptif Frekuensi Variabel Penerapan SAP berbasis Akrual (X2)	67
Tabel IV.9 Analisis Statistik Deskriptif Frekuensi Variabel Kualitas Laporan Keuangan	68
Tabel IV.10 Hasil Statistik Lingkungan Pengendalian.....	69

Tabel IV.11	Hasil Statistik Pengendalian Risiko	69
Tabel IV.12	Hasil Statistik Kegiatan Pengendalian	70
Tabel IV.13	Hasil Statistik Informasi dan Komunikasi.....	71
Tabel IV.14	Hasil Statistik Pemantauan	72
Tabel IV.15	Hasil Statistik PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan	73
Tabel IV.16	Hasil PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas	73
Tabel IV.17	Hasil Statistik Statistik PSAP 03 Laporan Arus Kas .	74
Tabel IV.18	Hasil Statistik PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan.....	75
Tabel IV.19	Hasil Statistik PSAP 05 Akuntansi Persediaan.....	75
Tabel IV.20	Hasil Statistik PSAP 06 Akuntansi Investasi	76
Tabel IV.21	Hasil Statistik PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap	76
Tabel IV.22	Hasil Statistik PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan	77
Tabel IV.23	Hasil Statistik PSAP 09 Akuntansi Kewajiban.....	77
Tabel IV.24	Hasil Statistik PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak ditindak Lanjuti	78
Tabel IV.25	Hasil Statistik PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi	78
Tabel IV.26	Hasil Statistik PSAP 12 Laporan Operasionalisasi.....	79
Tabel IV.27	Hasil Statistik Relevan	80
Tabel IV.28	Hasil Statistik Andal	81

Tabel IV.29	Hasil Statistik Dapat dibandingkan.....	82
Tabel IV.30	Hasil Statistik Dapat dipahami	82
Tabel IV.31	Hasil Uji Multikolinearitas	85
Tabel IV.32	Hasil Uji Autokorelasi.....	86
Tabel IV.33	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	87
Tabel IV.34	Hasil Uji F	89
Tabel IV.34	Hasil Uji t.....	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar IV.1 Hasil Pengujian Normalitas	84
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Format Kuesioner
Lampiran II	Hasil Kuesioner
Lampiran III	Tabel Statistik.....
Lampiran IV	Hasil Uji Statistik
Lampiran V	Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi.....
Lampiran VI	Fotocopy Surat Keterangan Riset dari Tempat Penelitian.....
Lampiran VII	Fotocopy Sertifikat Membaca dan Hafalan Al-Qur'an.....
Lampiran VIII	Fotocopy Sertifikat TOEFL
Lampiran IX	Fotocopy Sertifikat Pelatihan SPSS
Lampiran X	Biodata Penulis.....

ABSTRAK

Heru Nurmansyah/222015094/2019/Pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual Terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah(Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu)/Akuntansi Sektor Publik

Penelitian ini dibuat untuk menjawab masalah yaitu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Bengkulu. Variabel dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu asosiatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan kuesioner dan resume Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK yang telah di publikasikan. Metode analisis yang digunakan kuantitatif dan kualitatif dengan bantuan program Statistical Program Science (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bengkulu. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Bengkulu. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bengkulu.

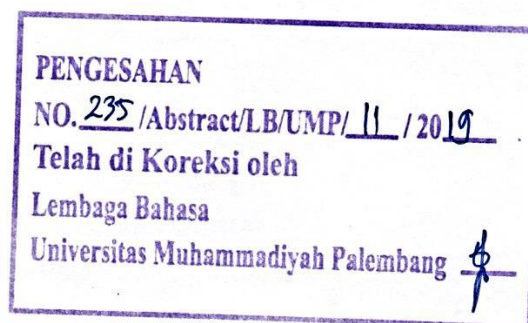
Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Abstract

Heru Nurmansyah/222015094/2019/The Effects of internal control systems and the implementation of accrual-based government accounting standards in the quality of local government financial statements (Case Study of Regional Device Organization Bengkulu)/Public Sector Accounting

This research was made to answer the problem, namely the formulation of the problem in this study was to know the effects of internal control system and the implementation of accrual-based government accounting standards in the quality of local government financial statements? The purpose of the study was to determine the effects of internal control system and the implementation of accrual-based government accounting standards in the quality of local government financial statements in Bengkulu. The variables in this study were internal control systems and the implementation of accrual-based government accounting standards in the quality of local government financial statements. The type of research used associative. The data used primary data and secondary data, data collection techniques with questionnaires and resumes of published of Semester Examination Results (IHPS). The analytical method used quantitative and qualitative with the help of the Statistical Program (SPSS) program. The results showed that the internal control system and the implementation of accrual-based government accounting standards had an effect in the quality of local government financial statements in Bengkulu. The internal control system did not affect in the quality of local government financial statements in Bengkulu. The application of accrual-based government accounting standards had an in the quality of local government financial statements in Bengkulu.

Keywords: Internal Control System, Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards, Quality of Government Financial Statements.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak era reformasi, tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan semakin banyak diungkapkan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan sebagai pertimbangan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah kepada rakyat, atas pengelolaan dana publik.

Anggota V BPK Moermahadi mengungkapkan bahwa Ibukota sendiri masih mendapati masalah dalam pengelolaan keuangannya, BPK hanya mengeluarkan opini Wajar Dengan Pengecualian untuk laporan keuangan Pemerintah DKI Jakarta, berikut dasarnya: (1) Saldo piutang pajak kendaraan bermotor senilai Rp20,14M tidak didukung WP, jenis kendaraan, dan masa pajak terutang yang lengkap dan akurat. (2) Rekomendasi BPK pada temuan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun sebelumnya terkait aset yang bersifat tetap belum ditindaklanjuti secara memadai oleh Pemprov DKI. (3) Penghapusan aset tetap senilai RP 168,01M tidak berdasarkan usulan penghapusan dari SKPD pengguna barang dan SK penghapusan dari gubernur. (4) Perbedaan data nilai penghapusan asset yg dihapuskan di

BPKAD dan koreksi pencatatan atas saldo aset yang dihapuskan tidak dapat ditelusuri.

Laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu informasi keuangan yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal.

Ketua BPK-RI Harry Azhar Aziz mengungkapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan juga masih menemukan ketidak konsistenan penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah (ISAP) terkait pencatatan Penyertaan Modal Negara (PMN). Saat ini, Indonesia belum menerapkan standar akuntansi internasional secara penuh. Salah satu ciri standar akuntansi internasional adalah diberlakukannya sistem pencatatan berbasis akrual. Dulu, Indonesia masih menggunakan standar pencatatan berbasis kas. Sebelum beralih ke pencatatan berbasis akrual, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) telah menyusun secara lengkap standar akuntansi pemerintah berbasis kas yang menuju akrual.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyoroti sistem pengendalian intern (SPI) yang masih tidak tertata. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2015 saja, 48,88 persen masalah dalam temuan BPK disebabkan lemahnya SPI. Diperlukan terobosan dalam SPI agar satuan-satuan kerja (satker) di kementerian dan pemerintah daerah benar-benar bekerja memberikan konsultasi dan pembinaan dalam setiap transaksi keuangan. BPK menyampaikan dari 666 objek pemeriksaan, masih ada 10.154 temuan yang memuat 15.434 permasalahan, yang meliputi 7.544 (48,88 persen) permasalahan kelemahan SPI dan 7.890 (51,12 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp33,46 triliun.

Kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional pemerintah daerah (Dadang, 2015: 26). Hal senada yang dinyatakan oleh Erlina dkk, (2015: 19) Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah PP No.71 Tahun 2010 yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memenuhi kriteria kualitatif seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai kualitas laporan keuangan pemerintah yang memadai. Sistem pengendalian intern sendiri memiliki peran yang penting dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan bagian integral dari sistem akuntansi pemerintahan. Instansi pemerintah harus membangun dan memiliki sistem pengendalian internal yang baik, seringkali terjadinya berbagai kasus korupsi, pengelewangan keuangan negara, pemborosan anggaran, inefisiensi organisasi, dan kualitas laporan keuangan pemerintah yang buruk salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya sistem pengendalian intern (Mahmudi, 2016:251).

Peningkatan kualitas pengendalian intern yang semakin baik dapat mengurangi keinginan dan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan. Sehingga integritas pejabat dan pegawai pemerintah akan semakin meningkat dan pada akhirnya wibawa pemerintahan dimata masyarakat akan semakin baik. Tahun 2008 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah tersebut di prakarsai oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai pelaksanaan dari pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.

Penyusunan laporan keuangan pada sektor publik telah mengalami perubahan sistem akuntansi yang digunakan, dari sistem akuntansi berbasis kas menjadi sistem akuntansi berbasis akrual. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual. Pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 batas waktu penerapan sistem akuntansi berbasis akrual secara penuh (*full accrual*) diundur sampai dengan tahun 2014, hal ini berarti pada tahun 2015 pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah harus menerapkan standar akuntansi berbasis akrual secara penuh.

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum

dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Indra, 2010:134).

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Irzal dan Suparno (2017) hasil penelitian ini bahwa Penerapan sistem informasi akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Penelitian lainnya dilakukan oleh Tuti (2014) yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Cianjur dengan kesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rukmi (2013) yang berjudul Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan sistem informasi akuntansi pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Fenomena yang didapat dari berita tahun 2016 bahwa Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan ada temuan-temuan pokok kelemahan dalam sistem pengendalian internal atas laporan keuangan Pemda Prov Bengkulu yakni: (1) Pengendalian internal atas persediaan kurang memadai. (2) Terdapat potensi kurang saji atas nilai piutang dalam laporan keuangan Pemda Prov Bengkulu. (3) Terdapat kesalahan penganggaran belanja senilai Rp 5.569Miliar lebih pada Dinas Pendidikan dan Anggaran. (4) Realisasi Hibah

Barang senilai Rp 41.231M juga pada Dinas Pendidikan belum sesuai dengan Permendagri no.39 tahun 2012. (5) Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemda Prov Bengkulu yakni Realisasi pemberian honor kegiatan di beberapa SKPD melebihi ketentuan sebesar Rp 6.555M lebih dan realisasi honorarium panitia pelaksanaan kegiatan minimal senilai Rp 26,015M lebih tidak dapat diyakini kewajarannya (Yusna Dewi Kepala BPK-RI) perwakilan provinsi Bengkulu.

Menyusun laporan keuangan dibutuhkan orang-orang yang berkompeten, serta memahami setiap standar atau peraturan yang telah ditetapkan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dari berbagai pihak. Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) di Wilayah Kota Bengkulu seperti tabel berikut:

Tabel I.1
Hasil Opini BPK atas LKPD Kota Bengkulu
Tahun 2013-2017

Pemerintah Kota Bengkulu			
No	Tahun	Opini IHPS I	Opini IHPS II
1	2013	WDP	WDP
2	2014	WDP	WDP
3	2015	WDP	WDP
4	2016	WDP	WDP
5	2017	WDP	-

Sumber : IHPS I dan II 2018 BPK.go.id

Berdasarkan Tabel I.1 dapat dilihat bahwa opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Kota/Kabupaten Wilayah Prov. Bengkulu belum maksimal, dapat dibuktikan

dengan opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian belum didapat oleh semua daerah, dan pada tahun 2017 masih terdapat 8 daerah yang mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian, salah satunya yaitu Kota Bengkulu.

Yuan Candra Djaisin (Ketua BPK perwakilan Bengkulu) mengungkapkan ada beberapa temuan yang menyebabkan kegagalan delapan Pemda yakni Pemda Kota dan Pemda Kaur, Pemda Bengkulu Selatan, Pemda Benteng serta Pemda Bengkulu Utara dan Pemda Lebong serta Pemda Kepahiang tidak dapat opini WTP, hal ini disebabkan masih kurangnya pengendalian intern terkait penatausahaan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa dan kurangnya sertifikasi dan pengelolaan bukti. Selain itu juga kurangnya pengelolaan belanja modal jalan, bangunan serta gedung lainnya. Kurangnya pendataan aset tetap terutama keberadaan aset tetap. Terjadinya kekurangan kas daerah pada perbendaharaan dan masih banyaknya pembayaran proyek yang mengalami kelebihan, hal ini merupakan penyebab tidak terpenuhinya Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sebagaimana yang telah dinyatakan dalam PP no.71 Tahun 2010 yaitu mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas.

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan pemda Bengkulu yakni : (1) kekurangan volume 24 paket pekerjaan jalan dan irigasi sebesar Rp4,42 M. (2) indikasi lebih bayar pekerjaan jalan di Pulau Enggano sebesar Rp7,1 M di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari piutang sebesar itu, baru tertagih sebesar Rp1,13 M. (3) pemeriksaan belanja modal jalan dan jaringan irigasi tahun 2016 yang belum

ditindaklanjuti sebesar Rp2,7 M. (4) piutang pemprov Bengkulu tahun anggaran 2016 yang belum tertagih optimal sebesar Rp5,94 M.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah** (Survey pada OPD Kota Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Bagaimana pengaruh standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu tentang sistem pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi OPD Kota Bengkulu

Penelitian ini sebagai masukan dan gambaran untuk pemerintah daerah dalam melakukan sistem pengendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan kualitas laporan keuangan pemerintah di masa yang akan datang

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang sifatnya sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung. 2012. *Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*. Bandung: ALFABETA
- Abdul Halim. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Brink Alexander. 2011. *Corporate Governance and Business Ethics*. London New York: Springer Dordrecht Heidelberg
- Commite Of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. 2013. *Internal Control – Integrated Framework*. Diakses 12 November 2018. Melalui <https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary.pdf>
- Dadang Suwanda dan Hendri Santosa. 2015. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual: Berpedoman Pada SAP*. Bandung: Rosda
- Dina Fitri Septarini, Frans Papilaya. 2016. Interaksi Komitmen Organisasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*. Vol.7, No.2: Hal.100-116, dari file C:\Data (D)\UP\Matriks.
- Elsye Rosmery. 2016. *Dasar-dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Erlina, Omar Sakti R dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah: Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat
- Harry Azhar Aziz. 2015. BPK soroti SPI yang Semrawut. Dipublikasi 12 Oktober 2015, diakses dari www.pikiran-rakyat.com
- Hery. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Jakarta: Bumi Aksara
- I Gede Kestawa. 2016. Laporan Keuangan 2015 4 daerah WDP. Dipublikasi 12 juni 2016, diakses dari www.mureks.co.id
- I Gusti Agung Rai. 2011. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari www.BPK.go.id

- Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS IBM 2.1*. Edisi Ketujuh. Semarang: UNDIP
- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*: Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Irzal Tawaqal Suparno. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* Vol.2, No.4, Hal.125-135. dari file C:\Data (D)\UP\Matriks
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press
- Moermahadi. 2015. Ada Masalah dalam Pengelolaan Keuangan DKI Jakarta. Retrieved 6 juli 2015, dari www.megapolitan.kompas.com
- Nikke Yusnita Mahardini dan Ade Miranti. 2018. Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi* Vol.4, No.1, dari file C:\Data (D)\UP\Matriks
- Nurlis dan Winwin Yadiati. 2017. The Influence of Internal Control Effectiveness, Information. Technology Utilization and Human Resources Competence on Local Government Financial Reporting Quality (Survey on SKPD Banten Provincial Government and Serang City). *Research Journal of Finance and Accounting*. 8(12): 119
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. 2008. Jakarta: Menteri Dalam Negeri
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2010. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Ramli Faud. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia
- Romie Priyastama. 2017. *SPSS Pengolahan Data dan Analisis Data*. Jogyakarta: Start Up
- Rukmi Juwita. 2013. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan . *Trikonomika* Vol.12, No.2, Hal.201- 214, dari file C:\Data (D)\UP\Matriks

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian (Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Tuti Herawati. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR – Study & Accounting Research* Vol.11, No.1, Hal.1-14, dari file C:\Data (D)\UP\Matriks
- Uma Sekaran. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis*:Edisi keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Winwin Yadiati dan Abdulloh Mubarak. 2017. *Kualitas Pelaporan Keuangan*. Edisi 6. Buku Pertama. Jakarta: Kencana.
- Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofiati. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Yuan Candra Djaisin. 2018. Banyak Temuan, 8 Pemda WDP. Dipublikasi 28 mei 2018. Diakses dari www.rmolbengkulu.com
- Yusna Dewi. 2015. Pemprov, Bengkulu Utara, Benteng dan Kaur dapat WTP. Dipublikasi 30 mei 2018. Diakses dari www.harianrakyatbengkulu.com